

Dampak Sistem Zonasi PPDB Terhadap Mutu Pendidikan dan Kesenjangan Antar Sekolah

Najwa Novia Ulfa Samosir¹, Usiono²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: najwanoviaulfasamosir@gmail.com¹, usiono@uinsu.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis berbagai hasil penelitian terkait dampak penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terhadap mutu pendidikan dan kesenjangan antar sekolah di Indonesia. Kebijakan sistem zonasi diterapkan pemerintah dengan tujuan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, namun dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai dinamika di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan menelaah beberapa artikel ilmiah yang diterbitkan semenjak diberlakukannya sistem zonasi dalam PPDB dari berbagai database seperti Google Scholar, Garuda, dan ResearchGate. Data dianalisis melalui proses identifikasi, seleksi, evaluasi kualitas, dan sintesis temuan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem zonasi berkontribusi positif terhadap pemerataan akses pendidikan, terutama dalam distribusi siswa berdasarkan wilayah domisili. Namun demikian, beberapa penelitian mengungkap bahwa kebijakan ini juga menimbulkan tantangan baru berupa penurunan kualitas input siswa di sekolah unggulan dan belum meratanya kualitas guru serta sarana prasarana antar sekolah. Secara keseluruhan, penerapan zonasi PPDB dapat memperkecil kesenjangan akses, tetapi belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kesetaraan mutu pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendukung berupa pemerataan sumber daya pendidikan agar tujuan zonasi dapat tercapai secara optimal. Kata kunci: Sistem Zonasi, Mutu Pendidikan, Kesenjangan Antar Sekolah.

ABSTRACT

This study aims to systematically review various research findings related to the impact of implementing the zoning system in the New Student Admission (PPDB) policy on the quality of education and inequality among schools in Indonesia. The zoning policy was introduced by the government to ensure equitable access and quality in education; however, its implementation has generated various challenges in practice. The research method used is a Systematic Literature Review (SLR), analyzing several scholarly articles published since the introduction of the PPDB zoning system, obtained from databases such as Google Scholar, Garuda, and ResearchGate. The data were analyzed through a process of identification, selection, quality evaluation, and synthesis of findings. The results indicate that the zoning system contributes positively to the equal distribution of educational access, particularly in student placement based on residential areas. Nevertheless, several studies reveal new challenges, including the decline in student quality at previously high-achieving schools and the uneven distribution of teachers and educational facilities. Overall, the implementation of the PPDB zoning system has reduced disparities in access but has not yet fully succeeded in achieving equality in educational quality. Therefore, supporting policies that promote the equitable distribution of educational resources are essential to optimize the goals of the zoning system. Keywords: Zoning System, Educational Quality, School Inequality.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia terus berupaya untuk menjadi negara maju dalam bidang pendidikan. Sebagai wujud komitmen tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Undang-undang ini memiliki visi untuk mewujudkan sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa sebagai sarana sosial yang mampu memberdayakan seluruh warga negara agar berkembang menjadi manusia berkualitas, serta mampu dan tanggap terhadap perubahan zaman. Pendidikan dipandang sebagai proses yang harus melibatkan berbagai komponen, seperti lingkungan, masyarakat, dan sumber daya yang ada. Keterlibatan semua pihak ini diharapkan dapat memberikan umpan balik yang berguna untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pendidikan nasional. (Rihardi & Yusliwidaka, 2020)

Kebijakan ini mulai diterapkan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran lebih besar dalam menyesuaikan penyelenggaraan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya, termasuk dalam hal pengelolaan sistem penerimaan peserta didik baru melalui dinas pendidikan masing-masing daerah. (Muammar, 2019)

Mulai 2017, pemerintah pusat memberlakukan kebijakan zonasi sekolah untuk mengatasi problem ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan zonasi sekolah diyakini pemerintah pusat mampu mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan antar sekolah dan berkeadilan. Berangkat dari pandangan ideal tersebut, metode studi evaluasi kebijakan digunakan untuk menilai sejauhmana kebijakan zonasi sekolah mampu mencapai tujuannya, yaitu pemerataan kualitas pendidikan antar sekolah. (Sidik, 2024)

Sistem Zonasi itu adalah sistem penerimaan peserta didik disetiap awal tahun pembelajaran sebagai masuk di satu lembaga pendidikan melalui mekanisme baik itu jejaring (*daring online*) maupun luar jejaring (*luring offline*) dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak yang berada di daerah zonasi tanpa melihat pada nilai, namun lebih melihat pada akses mereka lebih dekat dengan sekolah. (Datuk, 2020)

Penerapan kebijakan zonasi pada tahun 2019 mulai diberlakukan untuk tingkat SMP dan SMA di Indonesia secara serentak. Tercatat pada tanggal 5 Februari 2019, sudah ada 18 provinsi dari 34 provinsi yang mulai menyerahkan penetapan zonasi di sekolah menengah atas. (Mareta et al., 2021)

Pemerintah berupaya untuk memberikan pendidikan kepada seluruh warga Negara melalui pemerataan akses pendidikan. Dengan adanya pemerataan akses pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan meningkatkan akses pendidikan berdampak positif terhadap kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi. (Haryanti, 2020)

Sistem PPDB untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dalam Pasal 16 ayat (2), disebutkan bahwa jalur zonasi wajib mendapatkan kuota sebesar 80% dari total daya tampung sekolah. Artinya, sekolah negeri harus menerima minimal 80% peserta didik yang berdomisili di sekitar wilayah sekolah tersebut. Kebijakan ini kemudian dinilai sebagian pihak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 51 ayat (1), yang menjelaskan bahwa pengelolaan pendidikan, baik di tingkat dasar maupun menengah, seharusnya berlandaskan pada manajemen berbasis sekolah atau madrasah (MBS). Artinya, setiap sekolah memiliki otonomi dalam mengatur dan mengelola kebijakannya sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. (Ishak, 2020)

Sistem zonasi PPDB adalah jalur pendaftaran siswa yang memenuhi persyaratan wilayah zonasi domisili yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Layanan pendidikan yang adil adalah tujuan dari penerapan sistem ini. Oleh karena itu, dalam sistem pendidikan Indonesia, istilah "kasta" dan sekolah favorit telah dihilangkan. Menurut Nanggala (2020), sekolah harus menerima siswa yang

berasal dari radius terdekat dengan presentasi tertentu. Pasal 15 hingga 17 Permendikbud 17/2017 mengatur zonasi. Sekolah harus menerima paling sedikit 90% siswa yang tinggal dalam radius zona terdekat sekolah. Tidak lebih dari enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB, keterangan domisili harus dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan. (Yudhantaka et al., 2025)

Dengan demikian, pengaturan PPDB melalui zonasi seharusnya tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat dengan menetapkan aturan yang bersifat nasional, melainkan cukup memberikan pedoman umum. Sekolah dan pemerintah daerah seharusnya diberi ruang untuk menyesuaikan kebijakan tersebut agar lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Penetapan kuota zonasi sebesar 80% dianggap terlalu besar karena dapat mengurangi kesempatan bagi siswa berprestasi yang tinggal jauh dari sekolah negeri favorit untuk memperoleh pendidikan yang mereka inginkan.

Melihat adanya pro dan kontra tersebut, penting untuk melakukan kajian sistematis terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya guna mengetahui secara menyeluruh bagaimana dampak kebijakan sistem zonasi terhadap mutu pendidikan dan kesenjangan antar sekolah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menelaah berbagai literatur ilmiah yang relevan, menganalisis temuan-temuan utama, serta menyimpulkan sejauh mana kebijakan zonasi PPDB berpengaruh terhadap pemerataan mutu pendidikan di Indonesia.

Dengan melakukan telaah sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan sistem zonasi, mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) atau tinjauan pustaka sistematis, yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang dikaji. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diterapkan, serta bagaimana dampaknya terhadap pemerataan mutu pendidikan di Indonesia.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber literatur ilmiah, serta hasil penelitian lain yang membahas secara langsung maupun tidak langsung mengenai sistem zonasi dalam dunia pendidikan. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari berbagai basis data akademik, salah satunya *Google Scholar*, yang menjadi platform utama dalam menemukan referensi ilmiah yang kredibel dan relevan.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis secara sistematis dengan cara mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan keterkaitan antara teori-teori serta hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Analisis dilakukan tidak hanya untuk menggambarkan kembali isi literatur, tetapi juga untuk menemukan pola, kecenderungan, serta celah penelitian yang masih perlu dikaji lebih lanjut.

Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deduktif, artinya peneliti memulai pembahasan dari konsep-konsep umum terkait kebijakan pendidikan, sistem pemerataan mutu, serta prinsip desentralisasi pendidikan, kemudian mengarah pada pembahasan yang lebih khusus mengenai pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan zonasi diterapkan di berbagai daerah dan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuannya dalam menciptakan keadilan dan pemerataan pendidikan. (Daud, 2024)

Dengan demikian, metode *Systematic Literature Review* dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyusun argumen ilmiah yang kuat berdasarkan bukti empiris dari berbagai sumber akademik yang telah diakui.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keseluruhan hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi PPDB pada dasarnya memiliki tujuan baik, yaitu mewujudkan pemerataan akses dan kesempatan pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun kemampuan akademik. Sistem ini berhasil mengurangi praktik diskriminasi dalam penerimaan siswa baru serta menekan dominasi sekolah favorit dengan mendistribusikan siswa secara lebih merata berdasarkan wilayah tempat tinggal.

No	Penulis & Tahun	Judul Jurnal	Metode Penelitian	Hasil Utama	Kesimpulan
1.	(Rini Werdiningsih, 2023)	Implikasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB (Perspektif Orang Tua dan Sekolah)	Kualitatif dengan metode fenomenologi. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap guru, kepala sekolah, dan orang tua murid, serta triangulasi data untuk memastikan keabsahan.	1. Sistem zonasi membantu pemerataan akses pendidikan dan memperkuat hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar. 2. Mengurangi persaingan tidak sehat dan biaya transportasi siswa. 3. Namun, berdampak negatif pada mutu sekolah karena seleksi akademik tidak optimal. 4. Menimbulkan ketidakpuasan orang tua yang merasa kehilangan kebebasan memilih sekolah. 5. Sekolah dengan kualitas rendah mengalami peningkatan jumlah siswa, sementara sekolah unggulan mengalami penurunan jumlah pendaftar.	Sistem zonasi berkontribusi terhadap pemerataan akses pendidikan dan pengurangan kesenjangan antar sekolah, namun perlu diimbangi dengan peningkatan mutu sekolah di seluruh zona agar tidak menimbulkan penurunan kualitas pendidikan. Diperlukan sosialisasi kebijakan yang lebih baik kepada masyarakat agar pemahaman dan penerapannya berjalan efektif.
2.	Anissa Nurul Chotimah, Jemima Fathima Pasha, & Muhammad Sufyan Rabbani (2023) (Muhammad Sufyan	Polemik Sistem Zonasi PPDB dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan	Metode studi pustaka (literature review) dengan analisis konten terhadap buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi	1. Sistem zonasi diterapkan untuk menghapus ketimpangan dan meningkatkan pemerataan pendidikan antarwilayah. 2. Kebijakan ini membantu siswa	Sistem zonasi PPDB menjadi langkah awal pemerataan akses pendidikan, tetapi belum efektif dalam meratakan mutu pendidikan.

Rabbani et al., 2023)		tentang penerapan sistem zonasi PPDB.	mendapatkan akses pendidikan yang lebih dekat dan murah, namun belum mampu menyelesaikan masalah kesenjangan mutu antar sekolah. 3. Kurangnya sarana prasarana, kapasitas sekolah yang tidak seimbang, dan sosialisasi yang minim menyebabkan kebijakan ini tidak berjalan maksimal. 4. Sistem zonasi juga menurunkan motivasi belajar karena seleksi	Ketimpangan antara sekolah unggulan dan non-unggulan masih tinggi karena tidak diimbangi peningkatan sarana, prasarana, serta kualitas tenaga pendidik. Diperlukan perbaikan kebijakan dan pemerataan fasilitas agar sistem zonasi benar-benar menciptakan keadilan dan kesetaraan pendidikan.	
3.	Novrian Satria Perdana (2019) (PERDANA, 2019)	Implementasi PPDB Zonasi dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan	Pendekatan kualitatif dengan analisis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan FGD dengan kepala sekolah serta Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Data sekunder diperoleh dari BPS, Puspendik, dan PDSPK Kemendikbud. Analisis menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn (1975).	. PPDB Zonasi berhasil mendekatkan akses siswa ke sekolah terdekat sehingga menurunkan beban biaya dan waktu tempuh. 2. Pemerataan siswa berdasarkan jarak tempat tinggal mengurangi dikotomi antara sekolah unggulan dan non-unggulan. 3. Mutu input siswa mulai merata, meskipun terdapat penurunan nilai rata-rata masuk di sekolah favorit. 4. Kendala ditemukan pada kurangnya sosialisasi, persepsi negatif orang tua, serta keterbatasan	Kebijakan sistem zonasi PPDB di Sulawesi Tengah efektif dalam pemerataan akses pendidikan dan mulai menekan kesenjangan mutu antar sekolah. Namun, keberhasilan ini perlu ditunjang dengan peningkatan sarana prasarana, pelatihan guru, dan penyesuaian kuota siswa berprestasi agar tidak menurunkan motivasi belajar. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama dalam evaluasi berkala untuk

				sarana prasarana di beberapa sekolah. 5. Pemerataan mutu guru dan rotasi tenaga pendidik menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas antar sekolah.	memastikan mutu pendidikan tetap terjaga di seluruh zona.
4.	Nurkumala Sari & Risna Dewi (2023) (Sari & Dewi, 2023)	Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	1. Implementasi sistem zonasi di SMA Negeri 4 Kisaran sudah berjalan cukup baik, tetapi masih menghadapi kendala dalam komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. 2. Kurangnya koordinasi antara pihak sekolah, DPRD, dan Dinas Pendidikan menyebabkan ketidaktahuan batas wilayah zona dan kebingungan dalam proses pendaftaran. 3. Dari segi sumber daya, sekolah memiliki fasilitas dan tenaga yang cukup memadai, namun belum diimbangi dengan pemerataan kualitas di sekolah lain. 4. Sistem zonasi membantu pemerataan akses pendidikan, tetapi belum sepenuhnya berhasil meningkatkan mutu karena masih terdapat kesenjangan antar	Implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di SMA Negeri 4 Kisaran memberi dampak positif terhadap pemerataan akses pendidikan, namun belum optimal dalam pemerataan mutu antar sekolah. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi antar lembaga pendidikan menjadi faktor penghambat. Agar sistem zonasi dapat menekan kesenjangan mutu, dibutuhkan koordinasi yang baik, sosialisasi intensif, serta pemerataan fasilitas dan tenaga pendidik di setiap zona.

				sekolah di wilayah berbeda.	
5.	Novita Imroatun Solikha & Rochman Hadi Mustofa (2025) (Solikha & Mustofa, 2025)	Implikasi dan Strategi Sekolah Unggulan terhadap Sistem Zonasi	Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, melalui wawancara dan observasi di SMA Negeri 1 Surakarta, Purwokerto, dan Banjarnegara	Sistem zonasi memberi kesempatan pendidikan yang adil bagi siswa tanpa membedakan nilai akademik, namun menimbulkan tantangan bagi sekolah unggulan karena perbedaan kemampuan siswa yang diterima. Guru dituntut berinovasi dalam pembelajaran untuk menjaga mutu pendidikan.	Sistem zonasi membantu pemerataan akses pendidikan, tetapi memunculkan kesenjangan dalam mutu karena variasi kemampuan siswa. Sekolah unggulan berupaya mempertahankan kualitas melalui strategi pembelajaran inovatif, pelatihan guru, dan pengembangan kegiatan akademik serta non-akademik.
6.	Ahmad Mashudi (2019) (Mashudi, 2019)	Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam Mendorong Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia di Jawa Timur	Kualitatif deskriptif dengan studi kasus dan observasi dokumentatif	Sistem zonasi membantu pemerataan akses dan kualitas pendidikan antar wilayah, mencegah penumpukan siswa berprestasi di sekolah favorit, dan mendukung pemerataan SDM. Namun pelaksanaan di beberapa daerah belum siap karena sarana, prasarana, dan distribusi guru belum merata.	Sistem zonasi berperan penting dalam pemerataan mutu pendidikan dan pengurangan kesenjangan antar sekolah, tetapi implementasinya perlu perencanaan dan kesiapan yang matang agar benar-benar efektif.
7.	Mila Karmila, Niswatu Syakira, & Mahir (2020) (Karmila et al., 2020)	Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumen/teks	Sistem zonasi memperluas akses pendidikan dan menghapus dikotomi sekolah favorit, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif karena	Sistem zonasi berdampak positif terhadap pemerataan akses pendidikan, tetapi belum optimal mengatasi kesenjangan

				masih terjadi ketimpangan fasilitas, persepsi masyarakat, dan praktik kecurangan.	mutu antar sekolah karena belum diimbangi pemerataan sumber daya dan kesiapan daerah.
8.	Mallevi Agustin Ningrum, Suryanti, Wiryanto (2022) (Mallevi Agustin Ningrum et al., 2022)	Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan	Kualitatif deskriptif	Orangtua belum memahami aturan terbaru sistem zonasi; terdapat dampak positif dan negatif. Positifnya, mempermudah akses sekolah terdekat dan menekan biaya transportasi. Negatifnya, orangtua kecewa karena tidak bisa memilih sekolah yang diinginkan.	Sistem zonasi berkontribusi terhadap pemerataan akses pendidikan dan penghapusan label sekolah favorit, namun masih menimbulkan kesenjangan persepsi dan keterbatasan daya tampung sekolah. Diperlukan peningkatan sarana, mutu guru, dan perluasan zonasi agar mutu pendidikan lebih merata.
9	Risna, Lisdahlia, & Syamsul Edi (2020) (Risna et al., 2020)	Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan	Kualitatif deskriptif (observasi, wawancara, dokumentasi)	Implementasi sistem zonasi belum berjalan optimal; dampak negatif lebih banyak dirasakan daripada dampak positif. Dampak negatif meliputi kesenjangan antar sekolah, turunnya motivasi belajar, ketimpangan fasilitas, dan menurunnya prestasi sekolah.	Kebijakan zonasi bertujuan baik untuk pemerataan pendidikan, tetapi pelaksanaannya belum efektif dan menimbulkan kesenjangan mutu antar sekolah. Diperlukan evaluasi, pemerataan fasilitas, serta peningkatan sosialisasi agar tujuan pemerataan tercapai.
10.	Hidayah Setiyanti (2019)	Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Kualitatif dengan desain studi kasus, teknik	Penerapan sistem zonasi belum efektif; terjadi penurunan nilai	Sistem zonasi PPDB belum mampu meningkatkan

(Setiyanti, 2019)	Menggunakan Sistem Zona dalam Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan (Studi Kasus pada SMPN Kecamatan Temanggung)	observasi, wawancara, dan dokumentasi	rata-rata siswa dan minat pendaftar di sekolah pinggiran, sementara sekolah favorit tetap diminati. Ketimpangan antar sekolah masih tampak dari sarana, akses, dan persepsi masyarakat.	pemerataan mutu pendidikan karena masih ada kesenjangan antara sekolah pusat kota dan pinggiran. Diperlukan peningkatan sosialisasi, pemerataan fasilitas, dan perbaikan manajemen zonasi agar tujuan kebijakan tercapai.
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namun demikian, hampir semua penelitian menemukan bahwa pemerataan akses belum diikuti oleh pemerataan mutu pendidikan. Banyak sekolah di daerah masih tertinggal dalam hal sarana prasarana, kualitas guru, dan dukungan manajemen sekolah, sehingga muncul kesenjangan mutu antara sekolah unggulan dan sekolah biasa. Selain itu, kurangnya sosialisasi, koordinasi antar instansi, dan kesiapan daerah menjadi faktor penghambat utama efektivitas pelaksanaan kebijakan zonasi.

Beberapa jurnal juga menyoroti bahwa sistem zonasi menyebabkan perubahan komposisi siswa di sekolah unggulan, di mana kemampuan akademik siswa menjadi lebih beragam, sehingga guru perlu berinovasi dalam pembelajaran agar mutu tetap terjaga. Di sisi lain, sekolah non-unggulan mulai mendapatkan kesempatan untuk berkembang karena jumlah siswanya meningkat. Kebijakan sistem zonasi PPDB yang bertujuan untuk pemerataan mutu pendidikan dan mengurangi kesenjangan antar sekolah belum berjalan efektif di lapangan. Meskipun kebijakan ini secara konsep diharapkan dapat mempersempit jarak kualitas antara sekolah favorit dan sekolah pinggiran, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif masih lebih dominan. Sekolah di pusat kota tetap menjadi pilihan utama karena fasilitas dan mutu yang lebih baik, sedangkan sekolah pinggiran mengalami penurunan jumlah pendaftar dan prestasi akademik. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap “sekolah favorit” belum berubah. Dengan demikian, sistem zonasi perlu evaluasi menyeluruh melalui peningkatan sosialisasi, pemerataan sarana-prasarana, serta kebijakan pendukung agar benar-benar mampu mewujudkan mutu pendidikan yang merata dan mengurangi kesenjangan antar sekolah.

Secara keseluruhan, sistem zonasi PPDB berdampak positif terhadap pemerataan akses pendidikan, tetapi belum optimal dalam pemerataan mutu dan pengurangan kesenjangan antar sekolah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan, pemerataan distribusi tenaga pendidik dan fasilitas sekolah, serta peningkatan sosialisasi dan koordinasi antar pihak terkait agar sistem ini benar-benar dapat menciptakan keadilan dan mutu pendidikan yang merata di seluruh Indonesia.

Hasil kajian sistematik terhadap literatur dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan zonasi PPDB merupakan:

1. Strategi pemerintah untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Sistem ini membagi wilayah sekolah berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik agar setiap anak mendapat kesempatan bersekolah di lingkungan terdekat. Namun, pelaksanaannya menimbulkan berbagai implikasi. Di satu sisi, kebijakan ini membantu menghapus stigma sekolah favorit dan mendorong distribusi siswa yang lebih merata. Di sisi lain, muncul dampak negatif seperti menurunnya motivasi belajar, meningkatnya kenakalan remaja, dan berkurangnya tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Selain itu, kesenjangan mutu antar sekolah masih terlihat karena perbedaan fasilitas dan kualitas guru. Dengan demikian, sistem zonasi PPDB belum

sepenuhnya efektif dan perlu evaluasi serta pemerataan sarana dan tenaga pendidik agar tujuan pemerataan mutu pendidikan dapat tercapai. (Saadah et al., 2023)

2. Kebijakan zonasi PPDB merupakan upaya pemerintah untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan melalui penempatan siswa berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah. Kebijakan ini berdampak positif dalam mengurangi label “sekolah favorit”, menyeimbangkan jumlah siswa antar sekolah, dan memudahkan pengawasan orang tua. Namun, pelaksanaannya juga menimbulkan dampak negatif berupa ketimpangan kualitas antar sekolah, potensi kecurangan dalam penerimaan siswa, serta penutupan sekolah yang kekurangan murid. Dengan demikian, sistem zonasi masih memerlukan evaluasi dan pemerataan sarana pendidikan agar tujuan pemerataan mutu benar-benar tercapai. (Salim & Nora, 2022)
3. Kebijakan zonasi PPDB merupakan strategi pemerintah untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan menempatkan siswa berdasarkan jarak domisili ke sekolah. Kebijakan ini berhasil meningkatkan pemerataan penerimaan dan mengurangi diskriminasi sekolah favorit, namun masih menghadapi kendala seperti kesenjangan kualitas antar sekolah, keterbatasan daya tampung, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap pembatasan pilihan sekolah. Dengan demikian, sistem zonasi PPDB dinilai sebagai kebijakan yang baik secara konsep, tetapi memerlukan evaluasi, peningkatan sarana, dan sosialisasi agar dapat benar-benar mewujudkan keadilan dan pemerataan mutu pendidikan. (Af et al., 2025)

Jadi kebijakan sistem zonasi PPDB merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan di Indonesia. Secara konseptual, kebijakan ini mampu mengurangi stigma sekolah favorit, pemeratakan distribusi siswa, serta mendekatkan akses pendidikan dengan tempat tinggal. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti kesenjangan mutu antar sekolah, keterbatasan fasilitas, perbedaan kualitas guru, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. (Wahyudi & Lutfi, 2019) Oleh karena itu, sistem zonasi PPDB dinilai belum sepenuhnya efektif dan memerlukan evaluasi berkelanjutan serta pemerataan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik agar tujuan utama pemerataan mutu pendidikan benar-benar tercapai.

KESIMPULAN

Penelitian *Systematic Literature Review* ini menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi PPDB merupakan strategi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan di Indonesia. Secara konseptual, kebijakan ini berhasil menghapus stigma sekolah favorit, memperluas akses bagi peserta didik di berbagai wilayah, serta mengurangi diskriminasi dalam penerimaan siswa baru. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti ketimpangan kualitas antar sekolah, keterbatasan sarana prasarana, kurangnya sosialisasi, dan distribusi tenaga pendidik yang belum merata. Akibatnya, pemerataan akses belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan mutu pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan, pemerataan fasilitas dan kualitas guru, serta kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar sistem zonasi benar-benar efektif dalam menciptakan keadilan dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Af, A., Rahmawati, W., & Widiyanah, I. (2025). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Dengan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 2 Buduran kemajuan zaman , ilmu pengetahuan , dan dinamika budaya . Pendidikan yang*. 10(2).
- Datuk, A. (2020). Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak Yang Bermutu Di Kota Kupang. *Attractive : Innovative Education Journal*, 2(2), 20. <https://doi.org/10.51278/aj.v2i2.40>
- Daud, Y. M. (2024). Perkembangan Kebijakan Pendidikan di Indonesia: A Systematic Leterature Review. *Intelektualita*, 13(1), 115–131. <https://doi.org/10.22373/ji.v13i1.24871>
- Haryanti, A. (2020). Implementasi Kebijakan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 Berdasarkan Sistem

- Zonasi untuk Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 97–106.
- Ishak, D. C. S. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 92. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7829>
- Karmila, M., Syakira, N., & Mahir, M. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Mappesona*, 2(1), 1–14. <https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/mappesona/article/download/827/559>
- Mallevi Agustin Ningrum, Suryanti, & Wiryanto. (2022). PENERAPAN SISTEM ZONASI KEBIJAKAN BARU BERDASARKAN PERSPEKTIF ORANGTUA SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), 932–940. <https://doi.org/10.31949/jcp.v8i3.2661>
- Mareta, I., Ayuningtyas, I., Rosa, D., & Islamiah, N. W. I. (2021). Analisis Kebijakan Zonasi: Terampasnya Hak Sekolah dan Siswa dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan*, 30(2), 235–244. <https://doi.org/10.32585/jp.v30i2.1522>
- Mashudi, A. (2019). Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 186–206. <https://doi.org/10.31538/ndh.v4i2.327>
- Muammar, M. (2019). PROBLEMATIKA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DENGAN SISTEM ZONASI DI SEKOLAH DASAR (SD) KOTA MATARAM. *El Midad*, 11(1), 41–60. <https://doi.org/10.20414/elmidad.v11i1.1904>
- Muhammad Sufyan Rabbani, Anissa Nurul Chotimah, & Jemima Fathima Pasha. (2023). Polemik Sistem Zonasi PPDB dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan. *Simpati*, 1(3), 204–212. <https://doi.org/10.59024/simpati.v1i3.227>
- PERDANA, N. S. (2019). Implementasi Ppdb Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78. <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>
- Rihardi, S. A., & Yusliwidaka, A. (2020). MENAKAR SISTEM ZONASI PENERIMAAN SISWA BARU DI ERA DESENTRALISASI PENDIDIKAN. *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.31932/ve.v11i1.540>
- Rini Werdiningsih. (2023). Implikasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam PPDB (Perspektif Orang Tua Dan Sekolah). *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(1), 261–267. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.681>
- Risna, Lisdahlia, & Edi, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan. *Mappesona*, 2(1), 1. <https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/viewFile/44799/28330>
- Saadah, N., Wastri, L., & Trisoni, R. (2023). Analisis Kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Serta Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 15(2), 227–238. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v15i2.2366>
- Salim, F. P., & Nora, D. (2022). Dampak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi (Studi Kasus: Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar di Kecamatan Matur). *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 1(1), 67–77. <https://doi.org/10.24036/nara.v1i1.20>
- Sari, N., & Dewi, R. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). *Journal of Social and Policy Issues*, 2, 50–56. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i2.161>
- Setiyanti, H. (2019). EFEKTIVITAS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MENGGUNAKAN SISTEM ZONA DALAM PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN (STUDI KASUS PADA SMPN KECAMATAN TEMANGGUNG). *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3(2), 162–171. <https://doi.org/10.31316/g.couns.v3i2.309>
- Sidik, F. (2024). Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dan dampaknya terhadap kualitas sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama: Studi kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

HUMANIKA, 24(1), 47–56. <https://doi.org/10.21831/hum.v24i1.68551>

Solikha, N. I., & Mustofa, R. H. (2025). Implikasi dan Strategi Sekolah Unggulan terhadap Sistem Zonasi. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(1), 551–564. <https://jurnaldidaktika.org>551

Wahyudi, M. A., & Lutfi, A. (2019). Analisis Reformasi Pendidikan dalam Mewujudkan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 191–201. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>

Yudhantaka, M. D., Duryat, M., Siber, U. I. N., & Nurjati, S. (2025). *Analisis Kebijakan Pendidikan di Bidang SPMB Berbasis Zonasi / Domisili Dan Problematikanya*. 18(2), 538–550.